



Judul : Prabowo Minta Menteri Parpol Cari Uang dari APBN
Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Prabowo Minta Menteri Parpol Tak Cari Uang dari APBN

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan para menterinya yang berasal dari partai politik kelak tidak coba-coba menyelewengkan anggaran negara untuk kepentingan partainya.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan seluruh partai politik pendukungnya untuk tidak menugaskan kaderanya yang menjadi menteri kelak sebagai sarana pencari uang. Apalagi, uang "setoran" untuk partai politik diambil dari anggaran negara.

"Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan, semua ketua umum, semua perwakilan, jangan menugaskan menteri-menteri yang Saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan Saudara tugas-kan untuk cari uang dari APBN, APBD," kata Prabowo dalam pidato politiknya dalam Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Grand Sahid, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Agenda itu turut diikuti Ketua Harian Partai Gerindra Sufni Dasco Ahmad. Begitu pula sejumlah elite PKB, seperti Ketua Umum PKB Muhammin Iskandar, Sekretaris Jenderal PKB Hassanudin Wahid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB

Rusdi Kirana, dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.

Prabowo menyadari, partai politik (parpol) membutuhkan sumber keuangan dan sumber daya agar tetap beroperasi. Namun, jangan sampai kebutuhan itu dipenuhi lewat permintaan "setoran" dari kader parpol yang menjabat sebagai menteri.

Menyadari itu, Menteri Pertahanan itu mengajak seluruh anggota parpol dan menteri mendatang untuk mencari cara yang baik, terbuka, dan tidak mengganggu institusi dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Dengan demikian, kekayaan bangsa dapat terkelola secara efektif tanpa bocor ke kantong-kantong pihak tak bertanggung jawab.

Apalagi, lanjut Ketua Umum Partai Gerindra itu, teknologi kian canggih. Kemampuan pengawasan terhadap aliran dana bisa maksimal. "Zamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba," ujarnya.

Selain arahan untuk tidak

menyalahgunakan uang negara, pidato Prabowo juga berbicara soal kondisi global, demokrasi, serta kontestasi Pilkada 2024. Demokrasi Indonesia, kata Menteri Pertahanan, memiliki ciri khas yang tak bisa disamakan dengan negara lainnya. Kritik harus disampaikan secara sopan, bukan dalam bentuk makian.

Dalam forum itu, Muhammin Iskandar meminta Prabowo untuk meninjau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Aturan itu salah satunya mengatur soal honorarium anggota DPRD. "Sederhana. Bapak, Bapak meninjau saja Perpres Nomor 33. Jadi, peninjauan terhadap Perpres 33 yang memungkinkan tugas-tugas DPRD bisa berjalan dengan optimal karena rata-rata APBD kita juga mampu menjadi dan menyangga seluruh tugas-tugas DPRD," katanya.

Bagi Muhammin, revisi aturan tersebut sejalan dengan cita-cita Prabowo agar pertumbuhan ekonomi naik sebesar 8 persen. Angka ambisius itu perlu di-

dukung dengan pertumbuhan ekonomi di daerah yang salah satunya adalah kontribusi DPRD.

Sudah serahkan nama

Hingga sepuluh hari jelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029, penyusunan kabinet baru sudah memasuki tahap finalisasi. Partai-partai politik sudah menyerahkan nama kader untuk dijadikan sebagai calon pembantu Prabowo di kabinet.

Meski demikian, partai-partai politik menyerahkan penentuan komposisi kabinet kepada Prabowo. Sebab, menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, permintaan partai cenderung sulit diakomodasi. Ini karena pembentukan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, Golkar pun tak mematok target soal menteri yang bakal didapat.

"Kami, kan, susah mau minta. Ini, kan, hak prerogatif presiden (Prabowo). Kami mau minta banyak, presiden kasih



sedikit. Kami minta sedikit, presiden nanti kasih banyak. Ya, kami syukuri sajalah," ujarnya.

Karena itu, partai berlambang pohon beringin itu pun tak menyusun kader prioritas yang bakal menempati posisi menteri. Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini pun menyerahkan nasib jabatannya mendatang kepada Prabowo.

Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. Sebagai partai yang menyatakan dukungan kepada pemerintahan, PKS menyerahkan keputusan pembentukan kabinet kepada Prabowo.

Saat ditanya soal jatah menteri PKS, Hidayat mengatakan tak mengetahui. Begitu pula kabar bahwa PKS akan mendapatkan satu posisi menteri di kabinet Prabowo. "Soal menteri diserahkan kepada hak prerogatif presiden. Presiden (terpilih) berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat PKS, Presiden PKS," tuturnya.

Sementara itu, sebelumnya, Prabowo menyampaikan akan melibatkan kembali sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya. "Kami tidak pikirkan orangtuanya siapa, sukunya apa, agamanya apa. Tetapi, dia mampu atau tidak berbuat yang terbaik untuk bangsa. Itu yang kami cari. Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya

pun demikian. Kebetulan, kalau orangnya masih bagus, pasti kami akan minta untuk ikut lagi," kata Prabowo di Jakarta, Rabu.

Sementara Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ada kemungkinan sebagian nomenklatur kementerian sudah selesai pada Jumat (11/10). Pada saat yang sama, penentuan alat kelengkapan DPR juga ditargetkan sudah final.

Adapun penyusunan kementerian berkaitan dengan pembentukan alat kelengkapan DPR. Sebab, DPR berencana menambah komisi untuk mengimbangi jumlah kementerian mendatang. "Besok sudah selesai. Mungkin sebagian sudah, sebagian belum (nomenklatur kementeriannya)," kata Dasco. (WTL)